

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA UMUM

(Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Timur)

Oleh:

**Muhammad Yusuf Alfarouq
E1A115086**

Lahirnya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berdasarkan amanah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimaksudkan untuk terciptanya suatu instansi yang berkompetensi untuk mengelola dan menyimpan benda sitaan. Pada praktiknya, pengelolaan benda sitaan belum maksimal dilakukan, hal ini ditandai dengan penurunan nilai benda sitaan baik secara kualitas maupun kuantitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara hasil tindak pidana umum di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Timur. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pelaksanaan dan hambatan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana umum di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Timur.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Timur sudah sesuai dengan pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Kendala yang dihadapi RUPBASAN Klas I Jakarta Timur dikarenakan adanya kendala dari segi penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Benda Sitaan, Barang Rampasan*

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF THE STATE CONFISCATED GOODS AND BOOTY MANAGEMENT AS CRIMINAL ACTS RESULT

**(A Study at The House for Keeping The State Confiscated Goods
(RUPBASAN) Class I East Jakarta)**

By:

**Muhammad Yusuf Alfarouq
E1A115086**

The inception of the house for keeping the state confiscated goods (RUPBASAN) based on Criminal Law Procedures's mandates intended for establish a worthy institute to manage and keep the confiscated goods. Practically, the management of the confiscated goods are not optimal that shown by its value deflation, qualitatively or quantitatively. This research is an empirical law research with juridical sosiological approach that describe the enforcement of the state confiscated goods management as criminal acts result in the house for keeping the state confiscated goods (RUPBASAN) Class I, East Jakarta. This research's spesification is descriptive. Analytical methods that used in this research are data collection, data qualification, then associate theories that relate with research's problem and make a conclusion, so that the enforcement and obstacles of the state confiscated goods management can be discovered.

This research result shows that the state confiscated goods management in the house for keeping the state confiscated goods (RUPBASAN) Class I East Jakarta had been appropriate to The Law and Human Rights Ministerial Ordinance no. 16 Tahun 2014 about Procedure of The State Confiscated Goods and Booty Management in The House for Keeping The State Confiscated Goods. The obstacles which commonly faced by RUPBASAN Class I East Jakarta are related to several aspects, such as law enforcer, tools, society and culture.

Keywords : *Management, Confiscated Goods, Booty*